

## TINJAUAN HISTORIS DAN FILOSOFIS PROBLEM PENDIDIKAN NASIONAL

MARYONO

Mahasiswa S3 Universitas Negeri Yogyakarta  
Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Abstract.** The national education problem to date continues to be worrying, the government is hobbled in preparing the solution scheme, event the problems that arise are not directly proportional to the solution prepared. The problem of education is not only on the existential plain but also on substantial issues of education. At the ontological level, the issue of educational figures seems to be relentless to incise the problem. The selection of education officials who are often politicized by governors and district heads have a systemic impact on the quality of education. Education officials are often chosen not because of competence but because of political closeness, as a consequence many overlapping education regulations are generated by less competent people, disproportionate distribution of educational affairs with budgeted funds, non-data-based decisions so as to position education toward absurdity and tackiness-remove future. At the epistemological level, the quality of our education has also never penetrated the prestigious world education rankings, far less than Singapore, a mini country of only 700 square kilometers as its two universities can penetrate 200 prestigious universities of the world. Our HDI also does not move from the number of hundreds (133 of 188 countries) this has not been added to the output of education that is less ready to use in the world of work. At an axiological level, the orientation of education to seek the truth is very far from the fire. The desire of the government to improve the quality of education with the standards and even the implementation of UNAS some time ago is often responded with no dignity by the community. The orchestra of dishonesty is sung simultaneously, compactly and systemically, even drawn by teachers and education officials only for fake self-esteem and fake school reputation, until UNAS is finally not the sole determinant of graduation anymore. This paper does not want to give a verdict and black status both to the government and to the community, but trying to find the dark entities that move the dynamics of national education negartif.

**Abstrak.** Problema pendidikan nasional hingga saat ini terus mengkhawatirkan, pemerintah terlihat tertatih menyiapkan skema solusi, bahkan persoalan yang muncul tidak berbanding lurus dengan skema solusi yang dipersiapkan. Problem pendidikan bukan hanya pada dataran eksistensial namun juga pada persoalan substansial pendidikan. Pada level ontologis persoalan figure kependidikan seakan tiada henti untuk menorehkan permasalahan. Pemilihan pejabat kependidikan yang sering dipolitisir oleh para gubernur maupun bupati berdampak sistemik pada kualitas pendidikan. Pejabat pendidikan sering dipilih bukan karena kompetensi namun karena kedekatan politik, sebagai akibatnya banyak regulasi pendidikan yang overlapping karena dihasilkan oleh orang yang kurang kompeten, pembagian urusan pendidikan yang tidak proporsional dengan dana yang dianggarkan, keputusan yang tidak berbasis data sehingga memposisikan pendidikan menuju absurditas dan keremangremangan masa depan. Pada level epistemologis kualitas pendidikan kita juga tidak pernah menembus peringkat yang bergengsi pendidikan dunia, kalah jauh dengan Singapura Negara mini yang luasnya hanya 700 km persegi karena dua universitasnya bisa menembus 200 perguruan bergengsi dunia. IPM kita juga tidak pernah beranjak dari angka ratusan (113 dari 188 negara) hal ini belum ditambah dengan output pendidikan yang kurang siap pakai di dunia kerja. Pada level aksiologis, orientasi pendidikan untuk mencari kebenaran sangat jauh panggang dari api. Hasrat pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan standard bahkan pelaksanaan UNAS beberapa waktu lalu sering direspon dengan tidak bermartabat oleh masyarakat. Orkestra ketidakjujuran dinyanyikan serempak, kompak dan sistemik bahkan didirigeni oleh guru dan pejabat pendidikan hanya untuk harga diri dan reputasi sekolah yang palsu, hingga akhirnya UNAS diputuskan bukan satu-satunya penentu kelulusan lagi. Paper ini tidak hendak memberikan vonis dan status hitam baik pada pemerintah maupun pada masyarakat namun berusaha menemukan entitas gelap yang menggerakkan dinamika negative pendidikan nasional.

## PENDAHULUAN

Jika dengan beragama seseorang bisa memiliki estetika moral, maka dengan ilmu seseorang bisa memiliki estetika intelektual. Jika dengan beragama seseorang bisa menjadi bangsawan moral, maka dengan ilmu

seseorang bisa menjadi bangsawan pikiran. Namun dalam rangka menanamkan ilmu tidaklah semudah membalikkan tangan. Sepanjang sejarah “mendidik” merupakan *crucial point* karena melibatkan *cultur*, *figure* dan struktur yang seringkali tidak

seiring sejalan dalam mengartikulasikan perannya. Sebagaimana yang terjadi di Negara kita, semua menyadari bahwa dengan pendidikan, kita bisa bermartabat dimata dunia. Namun dinamika kebijakan pendidikan dinegara kita mengalami berbagai macam problema.

Dalam perspektif ilmu filsafat, problematika pendidikan kita tidak hanya pada dataran *eksistensial*, namun juga pada dataran yang *substansial*, dengan kata lain problema pendidikan kita ada pada level *ontologis*, *epistemologis* maupun *aksiologis*. Hal ini tentu merupakan persoalan mendasar dan serius untuk dicari skema penyelesaian atas problema yang terjadi, ketika sesuatu itu bermasalah dari titik awal sebuah dinamika, dapat dipastikan resistensi akan terus menyertai perjalanannya.

Sebenarnya Pemerintah terus menerus melakukan upaya terstruktur untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik itu pada *figure* pejabat pendidikan, regulasi, anggaran maupun kebijakan-kebijakan pendidikan namun ternyata masalah yang muncul jauh lebih banyak dari antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah, keremang-remangan masa depan senantiasa membayangi wajah pendidikan kita.

Disisi lain, dilema muncul ketika hasrat menggebu pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Masyarakat menilai pemerintah terlalu memaksa dalam memberikan standard kelulusan. Masyarakat menghendaki sebelum standar kelulusan ditetapkan hendaknya sarana prasarana pendidikan ditingkatkan terlebih dahulu. *Damn if you do and damn if you don't*, keinginan pemerintah agar standard pendidikan kita tidak kalah dengan negara-negara tetangga bertepuk sebelah tangan dengan masyarakat.

Regulasi dan kebijakan UNAS beberapa waktu yang lalu sebagai misal, direspon dengan tidak bermartabat oleh masyarakat. Orkestra ketidakjujuran dimainkan secara serempak dan sistemik. Orkestra ketidakjujuran ini juga didirigeni oleh "oknum" (?) guru dan pejabat pendidikan setempat demi sebuah reputasi dan harga diri palsu sebuah sekolah. Menurut Kartini Kartono (2003: 16-22) kejahatan sistemik merupakan kejahatan yang memiliki tingkatan tertinggi setelah kejahatan individual dan situasional. Kejahatan sistemik adalah ketika segala pikiran yang menyimpang dari norma umum namun dirasionalisasi oleh semua anggota kelompok, sehingga menjadi deviasi yang terorganisir atau

deviasi sistemik. Akhirnya UNAS sebagai penentu kelulusan akhirnya direduksi bukan menjadi penentu tunggal kelulusan.

Kita juga pasti masih ingat, kejujuran seorang ibu di dusun Gadel Jawa Timur beberapa waktu yang lalu, dia memprotes keras sekolah ketika Alif sang anak dalam ujian di suruh gurunya membantu siswa lain dalam ujian? Apa yang terjadi? Masyarakat berdemo dan berduyun-duyun mengusir si Ibu hingga trauma untuk kembali ke rumahnya sendiri. Ironis sekali ternyata kejujuran semakin hari semakin mahal dan langka. Semakin hari masyarakat semakin mengandalkan kemampuan purbanya. Entitas ketidakjujuran semakin hari semakin kompak serempak dinyanyikan oleh masyarakat. Semakin hari semakin mewah “barang” yang bernama kejujuran hingga semakin sedikit masyarakat yang mampu memilikinya.

Keinginan kaum *softos/* cendekiawan bahwa pendidikan itu untuk kebajikan, keadilan dan kebenaran (Plato) (Ieuan.W: 2010:71). , untuk perkembangan intelektual yang terus menerus dan standar moral yang tinggi (Socrates) (David Carr, 2010:37) dan untuk pencarian yang obyektif akan kebenaran karena kebenaran merupakan

dasar ilmu pengetahuan (Aristoteles) (David Carr, 2010:30) masih sangat jauh panggang dari api.

Tidak hanya sampai disini, kamufase dan kepalsuan pendidikan kita, pemilihan pejabat pendidikan yang dipolitisir, politik anggaran, regulasi yang *overlapping, system* pendidikan yang dualisme antara kemenag dan kemdikbud, output pendidikan yang tidak siap pakai dan masih banyak lagi persoalan. Pertanyaan kuncinya adalah gejala apakah ini?

Makalah ini tidak hendak mendramatisir keadaan dan memberikan status hitam masyarakat kita, makalah ini bertujuan untuk menguak lebih dalam permasalahan pendidikan kita, menemukan entitas-entitas negative yang memberikan energi gelap pendidikan Indonesia serta berupaya menata dan menambal lobang-lobang dinamika pendidikan kita. Untuk memetakan permasalahan kami menelusuri problematika pendidikan mulai dari masa kolonial Belanda.

### **Problem Pendidikan Masa Kolonial Belanda**

Pada masa penjajahan Belanda, setidaknya ada tiga sistem pendidikan dan pengajaran yang berkembang saat itu. Pertama, sistem pendidikan

Islam yang diselenggarakan perantren. Kedua, sistem pendidikan Belanda. Sistem pendidikan Belanda diatur dengan prosedur yang ketat dari mulai aturan siswa, pengajar, sistem pengajaran, dan kurikulum. Sistem pendidikan Belanda pun bersifat diskriminatif. Sekolah-sekolah dibentuk dengan membedakan pendidikan antara anak Belanda, anak Timur Asing, dan anak Pribumi. Golongan pribumi ini masih dipecah lagi menjadi masyarakat kelas bawah dan priyayi. Susunan persekolahan zaman kolonial adalah sebagai berikut (Sanjaya, 2007:207)

Persekolahan anak-anak pribumi untuk golongan non priyayi menggunakan pengantar bahasa daerah, namanya Sekolah Desa 3 tahun. Mereka yang berhasil menamatkannya boleh melanjutkan ke Sekolah Sambungan (*Vervolg School*) selama 2 tahun. Dari sini mereka bisa melanjutkan ke Sekolah Guru atau Mulo Pribumi selama 4 tahun, inilah sekolah paling atas untuk bangsa pribumi biasa. Untuk golongan pribumi masyarakat bangsawan bisa memasuki *His Inlandsche School* selama 7 tahun, Mulo selama 3 tahun, dan *Algemene Middlebare School* (AMS) selama 3 tahun.

Untuk orang Timur Asing disediakan sekolah seperti Sekolah

Cina 5 tahun dengan pengantar bahasa Cina, *Hollandch Chinese School* (HCS) yang berbahasa Belanda selama 7 tahun. Siswa HCS dapat melanjutkan ke Mulo.

Sedangkan untuk orang Belanda disediakan sekolah rendah sampai perguruan tinggi, yaitu Eropese Legere School 7 tahun, sekolah lanjutan HBS 3 dan 5 tahun Lyceum 6 tahun, Middelbare Meisjeschool 5 tahun, Recht Hoge School 5 tahun, Sekolah kedokteran tinggi 8,5 tahun, dan kedokteran gigi 5 tahun.

Agar tidak banyak bangsa Indonesia yang melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, maka biaya kuliah pun dibuat sangat besar. Menurut Soenarta (2005) biaya kuliah untuk satu tahun di salah satu sekolah tinggi itu besarnya fl (*gulden*) 300. Saat itu, harga satu kilogram (kg) beras sama dengan 0,025 gulden. Maka, besar uang kuliah sama dengan 12.000 kg beras. Bila ukuran dan perbandingan itu diterapkan sebagai biaya kuliah di universitas sekarang, sedangkan harga beras sekarang (2017) rata-rata Rp 10.000 per kg, maka untuk kuliah di universitas biayanya sebesar Rp 120.000.000/ seratus dua puluh juta juta per mahasiswa per tahun. Sebuah harga yang sangat tidak terjangkau untuk mayoritas masyarakat Indonesia waktu itu.

Hal itu juga terjadi pada persekolahan tingkat menengah.

Besarnya biaya sekolah di MULO, setingkat sekolah lanjutan tingkat pertama, adalah sebesar 5,60 gulden per siswa per bulan, setara dengan 224 kg beras. Bila dihitung dengan harga beras sekarang 2017 sebesar 10.000 maka akan menjadi Rp 2.240.000 per siswa per bulan. Akhirnya dengan ongkos sekolah semahal itu banyak anak Indonesia yang lebih memilih masuk *Ambachtschool* atau *Technische School*, karena biayanya agak murah sedikit. Berbekal keterampilan yang diperoleh di *Ambachtschool* atau *Technische School*, siswa bisa langsung bekerja setelah lulus.

Disisi lain kurikulum pendidikan Belanda didesain untuk melestarikan penjajahan di Indonesia, maka pada kurikulum pun dikenalkan kebudayaan Belanda, juga penekan hanya pada menulis dengan rapi, membaca, dan berhitung, yang keterampilan ini sangat bermanfaat untuk diperbantukan pada Pemerintah Belanda dengan gaji yang sangat rendah. Anak-anak Indonesia pada zaman itu tidak diperkenalkan dengan budayanya sendiri dan potensi bangsanya. Hal ini sama persis dengan kondisi pendidikan sekarang. Meskipun tidak semahal zaman Belanda, namun hanya golongan tertentu

saja yang bisa mengenyam pendidikan Tinggi.

Permasalahan yang mendasar lainnya adalah kita menghendaki pendidikan yang berwajah Indonesia namun semua referensi berasal dari dunia Barat yang didesain dalam kultur dan konteks yang berbeda hingga siswa kita tercabut dari akar budayanya sendiri. Sebuah fenomena yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan fase penjajahan dahulu, sebagai akibatnya saat ini sangat sedikit siswa yang menyenangi wayang, gamelan, batik, tari dan seni tradisional lainnya sementara pada saat yang sama, beberapa sekolah Amerika memasukkannya kedalam kurikulum mereka. Pertanyaan kunci berikutnya gejala apakah ini?

### **Problem Ontologis Pendidikan Nasional**

Ontologi merupakan bahasa Yunani. Akar katanya adalah *Ontos-logos (Yunani)* atau ilmu-tentang adanya, menurut Heidegger Ontologi adalah analisis eksistensi akan sesuatu, analisis factor-faktor yang membatasi eksistensi, sedangkan menurut Gioberti ontology merupakan disiplin filsafat dasariah (Bagus, 2002: 748)

Dari perspektif ontology, ada beberapa aspek dari pendidikan kita yang perlu dicermati yakni

Ideologi Pendidikan yang dipilih, Regulasi dan Pembagian Urusan Pendidikan, Kemauan politik yang berpihak pada pendidikan, system pendidikan yang semuanya bermuara pada figur-figur pembuat keputusan dan para pejabat pendidikan. Kami akan uraikan satu persatu problem ontologis pendidikan Indonesia.



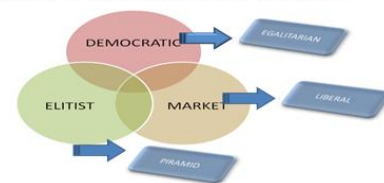
Gambar 1  
Problem Ontologis Pendidikan Nasional.

**Pertama** *keimbangan Ideologi:* Pendidikan adalah bagian dari rekayasa Ideologi. Melalui pendidikanlah masyarakat dibentuk dan diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan Negara. Paulo Freire sebagaimana dikutip Rohman (2009:4) meyakini bahwa pendidikan pada dasarnya selalu bersinggungan dengan kekuasaan. Pemerintahan adalah bagian dari negara yang paling kasat mata. Hegemoni politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah pemerintahan. Keterpautan antara pendidikan dengan kekuasaan dapat dilihat

sebagaimana keterpautan antara lembaga pendidikan dengan penyelenggara Negara, dalam hal ini wujud kongkrit lembaga pendidikan adalah sekolah dan Universitas. Persinggungan keduanya disebabkan karena keduanya bersumber pada system kepercayaan yang sama. Andi Makkulua menambahkan bahwa pelaksanaan pendidikan selalu ditentukan oleh corak ideologi suatu Negara (Rahman, 2009:7).

Tetapi pendidikan juga merupakan produk masyarakat. Dengan kata lain, ia juga bisa dilihat sebagai sebuah proses Ideologi. Sebab, bagaimanapun sistem atau modelnya, pendidikan tak mungkin terbebas dari pengaruh kesadaran dunia, cita-rasa, dan selera tertentu. Bahkan sangat boleh jadi ia dibentuk di bawah tekanan belenggu-belenggu Ideologi yang sedang berlaku. Ada tiga ideology besar pendidikan Dunia. Yang pertama adalah ideology pendidikan elitis, ideology pendidikan berbasis market/liberal dan Ideology pendidikan demokratis.

“IDEOLOGI PENDIDIKAN DUNIA”



Gambar 2  
Ideologi Pendidikan Dunia

Jika kita cermat menganalisis, kita akan menemukan fakta ironis yang ditimbulkan karena ketimpangan ideologis dari penentu kebijakan pendidikan kita. Salah satunya adalah marginalisasi pendidikan-pendidikan genuine Indonesia, seperti pesantren di Jawa, Sekolah Taman Siswa di Jogjakarta, surau=surau di Padang dan sekolah-sekolah sejenis. Para penentu kebijakan kurang memiliki keterpihakan pada pendidikan-pendidikan asli namun senantiasa meniru pola pendidikan orang lain. Pepatah tidak akan berubah bahwa "orang kalah akan meniru". Penyakit meniru ini terkadang tidak disertai akurasi dan kecermatan akan konsep yang ditiru.

Hingga saat ini para penentu kebijakan terkesan melakukan pembiaran pada ideology pendidikan yang berkembang. Tidak ada ketegasan untuk "memilih" ideology pendidikan hingga keremang-remangan ideology seakan belum akan berakhir. Mungkin para penentu kebijakan pendidikan tidak berani mengambil resiko atas pilihan-pilihan ideologinya.

**Kedua Problem Regulasi dan Pembagian Urusan Pendidikan:** Aspek regulasi merupakan aspek yang sangat mendasar dari jalannya pendidikan. Jika pada dataran regulasi (UU 20/2003, UU

32/2004, PP 38/2007, dan PP 17/2010.), pengambilan keputusan, pendanaan serta pemilihan pejabat pendidikan yang merupakan *starting point* desentralisasi pendidikan saja sudah "bermasalah" bagaimana mungkin pada dataran implementasi bisa benar karena semua "bermasalah" dari titik awal. Hal ini merupakan persoalan serius desentralisasi pendidikan karena menyangkut persoalan substansial bukan sekedar persoalan eksistensial.

Pembagian Urusan pendidikan selama ini kurang proporsional antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten. Terutama persoalan perimbangan pendanaan. Urusan pendidikan di level kabupaten yang lebih kompleks idealnya juga mendapat porsi dana yang seimbang. Pembagian Urusan pendidikan selama ini kurang proporsional antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten. Terutama persoalan perimbangan pendanaan. Urusan pendidikan di level kabupaten yang lebih kompleks idealnya juga mendapat porsi dana yang seimbang.

Pembagian urusan pendidikan yang kurang proporsional (termasuk dalam pendanaan), merupakan produk kebijakan yang kurang cermat dan lemah di level analisis, namun hal ini mungkin ada beberapa factor yang



mempengaruhi, bisa faktor politik namun juga faktor figur pejabat pendidikan yang kurang kompeten. **Untuk itu koreksi atas fenomena ini sangat penting untuk dijadikan masukan untuk pemetaan urusan pendidikan selanjutnya, dimanakah point permasalahan yang sebenarnya.** Akurasi titik permasalahan sangat dibutuhkan, karena desentralisasi pendidikan masih *on going process* dan membutuhkan waktu

***Ketiga adalah lemahnya Kemauan Politik Pendidikan:*** Dibutuhkan kemauan politik yang kuat agar pendidikan menjadi prioritas pembangunan. Dilain pihak Pemerintah juga kurang memiliki kemauan politik pendidikan dengan menggali model pendidikan yang berakar pada kebudayaan sendiri dan nilai-nilai bangsa. Indikator dari hal ini adalah kita senantiasa menggunakan referensi pendidikan model barat yang memiliki konteks nilai dan budaya yang berbeda padahal "*Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila dan uud 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman*". (UU sisdiknas 2003/ps 1)

***Keempat adalah dualisme system pendidikan*** di Indonesia: Dualisme sistem pendidikan Kementerian Agama/ Kemenag yang masih sentralis dan

kemendikbud yang sudah desentralis. Akibatnya Kesenjangan Manajemen dan keadilan subsidi menjadi permasalahan dan kecemburuan. Disisi lain dualisme ini juga menyebabkan ada superior dan inferior kelembagaan. Satu lembaga merasa sebagai penentu kebijakan dan yang lain menjadi makmum yang terus mengamini kebijakan-kebijakan sang imam pendidikan. Hingga sekarang dualism sistem pendidikan di Indonesia ini juga belum menemukan solusi terbaiknya.

***Kelima adalah figur pejabat pendidikan yang kurang kompeten:*** Pada era desentralisasi ini Gubernur dan bupati/ walikota memiliki kewenangan memilih pejabat dinas pendidikan propinsi dan kabupaten/kota, tetapi banyak terjadi *the wrong person in the wrong place*. Artinya pejabat pendidikan seringkali bukan dipilih karena kompetensi seputar pendidikan namun karena pertimbangan politik, atau kedekatan personal dengan gubernur atau walikota setempat.



Gambar 3  
Struktur Organisasi Pendidikan Indonesia

### Problem Epistemologis Pendidikan Nasional

Redaksi epistemologi berasal dari *Episteme-logos (Yunani)* yang artinya pengetahuan tentang pengetahuan namun ada kalanya disebut juga teori pengetahuan, (Loren Bagus, 2002:212) Ilmu-ilmu yang dimiliki oleh manusia berhubungan satu sama lain, dan tolok ukur keterkaitan ini memiliki derajat yang berbeda-beda. Sebagian ilmu merupakan asas dan pondasi bagi ilmu-ilmu lain, yakni nilai dan validitas ilmu-ilmu lain bergantung kepada ilmu tertentu, dan dari sisi ini, ilmu tertentu ini dikategorikan sebagai ilmu dan pengetahuan dasar.

Pada problem epistemologis pendidikan kita ada beberapa yang akan kami kritisi yang pertama adalah problematika pada persekolahan, kurikulum dan metode atau bagaimana ilmu itu disampaikan.



Gambar 4  
Problem Epistemologis Pendidikan Nasional.

Saat ini Perguruan Tinggi Indonesia kurang lebih berjumlah 3.150 buah yang terdiri dari PTN Umum berjumlah 83 PTN, PTN Khusus berjumlah 50 PTN, PTS berjumlah 3.017 PTS, TOTAL PT berjumlah = 3.150. (BPS: 2011). Namun yang perlu di garis bawahi adalah kenyataan dari lebih dari tigaribu Perguruan tinggi tersebut yang masuk peringkat 100 besar Asia tidak lebih dari 4 Perguruan Tinggi dan yang masuk 200 besar Asia juga tidak lebih dari 4 buah Perguruan Tinggi saja. Bahkan untuk 200 besar dunia dari lebih tigaribu lebih universitas tak satupun mampu menembusnya. Berbeda dengan tetangga mini kita Singapura yang berhasil memasukkan dua Universitasnya ke 200 besar Universitas Dunia, yakni pada peringkat 34 (NUS) dan 174 (NTU). Entah karena dididik oleh perguruan tinggi yang kurang berkualitas atau faktor lain IPM Indonesia tidak beranjak lebih unggul meskipun dengan Negara tetangga Singapura atau Malaysia.

Disamping kualitas pendidikan yang kurang meningkat dari tahun ke tahun, pada kasus pendidikan dasar dan menengah, penerapan kurikulum pendidikan para penentu kebijakan pendidikan juga terkesan ikut-ikutan dengan Negara lain yang kondisi social budayanya jelas berbeda. Padahal kurikulum harus direncanakan dengan sangat hati-hati, cermat dan penuh pertimbangan akan konskuensi pengetahuan yang disusun, mengandung pesan-pesan cultural setempat termasuk keterampilan hidup dan sikap yang bernilai (Winch & Gingell, 2004:18).

Pasca Indonesia merdeka dalam pendidikan dikenal beberapa masa pemberlakuan kurikulum yaitu kurikulum sederhana (1947-1964), pembaharuan kurikulum (1968 dan 1975), kurikulum berbasis keterampilan proses (1984 dan 1994), dan kurikulum berbasis kompetensi (2004 dan 2006). Dinamika kurikulum pendidikan dasar dan menengah dari berbagai sumber dapat diringkas sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Kronologis Perkembangan Kurikulum di Indonesia**

No.	Tahun	Model Kurikulum
1	1947	Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan. Istilah kurikulum masih belum digunakan. Sementara istilah yang digunakan adalah Rencana Pelajaran
2	1954	Kurikulum ini masih sama dengan kurikulum sebelumnya, yaitu Rencana Pelajaran
3	1968	Kurikulum ini merupakan kurikulum terintegrasi pertama di Indonesia. Beberapa masa pelajaran, seperti Sejarah, Ilmu Bumi, dan beberapa cabang ilmu sosial Mengalami fusi menjadi Ilmu Pengetahuan Sosial (Social Studies). Beberapa mata pelajaran, seperti Ilmu Hayat, Ilmu Alam, dan

		sebagainya mengalami fusi menjadi Ilmu Pengetahuan Alam (IPS) atau yang sekarang sering disebut Sains.
4	1975	Kurikulum yang menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Didasarkan pada MBO ( <i>management by objective</i> )
5	1984	Mengusung <i>process skill approach</i> . Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut "Kurikulum 1975 yang disempurnakan". Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau <i>Student Active Learning</i> (SAL).

		Tokoh penting dibalik lahirnya Kurikulum 1984 adalah Profesor Dr. Conny R. Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980-1986 yang juga Rektor IKIP Jakarta (sekarang Universitas Negeri Jakarta, <i>pen</i> ) periode 1984-1992. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diujicobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah.
6	1994	Kurikulum ini merupakan

		penyempurnaan dari kurikulum 1975, dan 1984, atau perpaduan kurikulum-kurikulum sebelumnya, namun akhirnya kurikulum ini terlalu padat dan direvisi kembali
7	2004	Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Kurikulum ini belum diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Beberapa sekolah telah dijadikan uji coba dalam rangka proses pengembangan kurikulum ini
8	2008	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) KBK sering disebut sebagai jiwa KTSP, karena KTSP sesungguhnya telah mengadopsi KBK. Kurikulum ini dikembangkan oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan).
9	2016	Kurikulum 2013.

Selain kurikulum persoalan metode pengajaran juga merupakan persoalan epistemologis yang tidak kalah pentingnya dengan kurikulum. Kurikulum yang baik namun disampaikan dengan metode yang kurang relevan juga akan menemui banyak hambatan, bahkan ilmu tidak akan tersampaikan. Banyaknya guru yang masih kurang inovasi dalam metode pengajaran, bahkan masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional misalnya , metode teksbook atau *teacher center* padahal teknologi telah berkembang dengan sangat cepat, dunia luar pendidikan juga memiliki tuntutan kompetensi yang lebih, bisakah metode penyampaian pelajaran lebih terapan dan kongkrit ?

Dari fakta yang ada kirangnya juga perlu dicermati dan menimbulkan pertanyaan Banyak pertanyaan epistemologis, dimana *something wrong* pendidikan kita? Mengapa perguruan tinggi kita peringkatnya senantiasa ada di rangking “bawah” dari perguruan tinggi Asia bahkan dunia? Apakah figure, kultur dan struktur pendidikan pada unit pendidikan terkecil (tingkat satuan PT/sekolah) ini juga bermasalah?. Apakah dosen, pejabat perguruan tinggi (rector-dekan-ketua jurusan) ternyata kurang kompeten?

Apakah mereka dipilih berdasar kompetensinya atau karena berdasar kemenangan politiknya? Atau ternyata tradisi akademik perguruan tinggi/sekolah tidak sehat? Apakah menjiplak bagi dosen maupun mahasiswa atau murid masih sering terjadi.

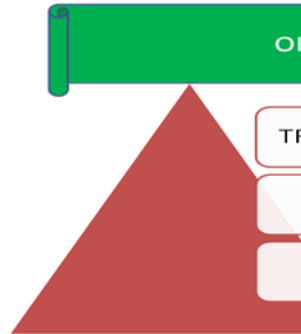
### **Problem Aksiologis Pendidikan Nasional**

Loren Bagus Aksiologi berasal dari kata *Axios* dan *logos* (*Yunani*) : Ilmu tentang yang pantas dapat juga diterjemahkan sebagai Analisis tentang Nilai-Studi tentang arti, ciri, asal, tipe, kriteria, ataupun status nilai . Dalam bidang aksiologi, masalah etika yang mempelajari tentang kebaikan ditinjau dari kesusilaan, sangat prinsip dalam pendidikan. Hal ini terjadi karena kebaikan budi pekerti manusia menjadi sasaran utama pendidikan dan karenanya selalu dipertimbangkan dalam perumusan tujuan pendidikan. Pendidikan bukan hanya soal kemajuan otak ataupun pengetahuan kognitif. Pendidikan juga bertujuan juga mengembangkan pribadi anak didik agar menjadi manusia yang utuh dengan segala nilai dan seginya. Oleh karena itu, pendidikan juga dapat mengajari nilai-nilai kehidupan manusia yang dianggap perlu seperti nilai sosialitas, nilai demokrasi, nilai

kesamaan, persaudaraan dan lain sebagainya.

Di samping itu pendidikan sebagai fenomena kehidupan sosial, kultural dan keagamaan tidak dapat lepas dari sistem nilai. Dalam masalah etika dan estetika yang mempelajari tentang hakekat keindahan, juga menjadi sasaran pendidikan, karena keindahan merupakan kebutuhan manusia dan melekat pada setiap makhluk. Di samping itu pendidikan tidak dapat lepas dari sistem nilai keindahan tersebut. Dalam mendidik ada unsur seni, terlihat dalam pengungkapan bahasa, tutur kata dan perilaku yang baik dan indah.

Pada dataran yang sangat ideal, pendidikan hendaknya bisa memadukan manusia sebagai fakta dan manusia sebagai nilai. Tiap manusia memiliki nilai tertentu sehingga situasi pendidikan memiliki bobot nilai individual, sosial dan bobot moral. Seni mengajarkan kepada kita berbuat, dan sebuah ilmu mengajarkan kepada kita mengetahui. Namun semangat mencari kebenaran hendaknya menjadi landasan utama dalam proses belajar mengajar. Mencari status social atau mencari nilai dalam pendidikan bukanlah sesuatu yang salah namun itu tidaklah cukup jika tidak didasari pencarian kebenaran hidup.



Gambar 4

#### Hierarki orientasi Pendidikan

Namun dilain pihak dalam konteks pendidikan nasional, level aksiologis merupakan konsekuensi dari epistemologi pendidikan yang dipilih dan ontologi pendidikan yang ada. Apabila ranah ontology maupun epistemology bermasalah maka pada level aksiologi akan juga mengalami beberapa kendala. Ini fakta yang tak terbantah. Ketika pemilihan figure pejabat pendidikan serta anggaran pendidikan dipolitisir, urusan urusan pendidikan tidak didistribusikan secara proporsional dan adil dari segi pendanaan, kurikulum tidak didesain secara komprehensif maka akhirnya cultur yang terbangun juga bermasalah.

Dari uraian dan beberapa analisis diatas, fakta-fakta dilapangan masih menunjukkan berbagai macam kendala hingga dinamika pendidikan dan proses pendidikan kurang berjalan optimal. Figur-figur pendidikan baik itu pejabat pendidikan

maupun tenaga kependidikan ketika tidak dipilih berdasar kompetensi tentu akan bermasalah ketika membuat keputusan atau dalam kontek tenaga didik akan bermasalah ketika mengajar. Akibat berikutnya adalah kualitas pendidikan kita yang akan menurun seiring dengan kualitas SDMnya.

Anggaran Pendidikan yang terus tidak terbebaskan dari politisasi anggaran juga akan berdampak signifikan pada dataran praksis. Sarana prasarana sekolah, gaji guru, fasilitas belajar merupakan aspek yang langsung terkena dampaknya. Ini empiric sekali betapa banyak sekolah roboh yang kita lihat dan dengar dari pemberitaan televise. Bahkan tidak jarang kepala sekolah yang berdedikasi harus menggadaikan SK hanya untuk kredit uang dan memperbaiki sekolah. Disisi lain ribuan guru-honor maupun guru luar biasa yang menerima gaji dibawah UMR (dan mereka hidup dalam harapan- suatu saat diangkat menjadi PNS) namun mereka tetap bersemangat untuk mendidik dan mendidik.

Dilevel perguruan tinggi, dosen-dosen pintar juga mulai melirik universitas Negara tetangga karena persoalan ini. Untuk tahap awal biasanya mereka hanya mengajar satu dua kali

dalam satu minggu. Namun lama kelamaan banyak diantara mereka yang kemudian berubah pikiran dan memilih untuk mengajar bahkan menetap di negeri orang dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Disisi lain ini juga kritik aksiologis kepada para dosen atau guru yang memiliki nasionalisme rendah dan memilih mengembangkan dan mendidik orang lain dari pada mendidik orang sendiri hanya karena soal kesejahteraan hidup.

### **Rekomendasi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis**

*Starting Point* untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita adalah figur pendidikan, seperti pejabat pendidikan maupun tenaga kependidikan. Hal ini disebabkan sumberdaya manusia memiliki point sentral untuk kemajuan sebuah lembaga. Dengan sumberdaya yang kompeten dan bertanggungjawab akan menghasilkan keputusan-keputusan yang mendasar yang baik seperti keputusan tentang: Peraturan perundang-undangan, struktur organisasi kependidikan, dana yang digunakan, struktur anggaran, regulasi seputar pelaksanaan pendidikan, semua akan mendekati pendidikan dengan kualitas yang diharap.

Pada dataran epistemologis dengan adanya figure yang

kompeten dan bertanggungjawab maka keterpihakan dengan pendidikan nasional akan lebih tegas baik itu pada aspek kurikulum atau metode pengajaran lebih relevan dan lebih dekat dengan masyarakat. Barangkali ini rekomendasi yang terlalu teknis namun menurut penulis penting sebagai misal, kurikulum kewirausahaan dapat mendidik siswa untuk membuka usaha, sehingga dapat membantu dirinya dan masyarakat untuk kesejahteraan hidupnya. Disamping itu, kurikulum juga hendaknya berbasis kearifan local, seperti adanya pelajaran wayang, gamelan, batik dan sebagainya.

Dengan demikian jika pada level ontology dan epistemology pendidikan terpenuhi standard kualitasnya maka pada dataran aksiologi diharapkan kultur yang akan terbangun merupakan kultur yang positif dan baik. Sebagai wadah pencarian kebenaran maka kebijakan atau apa yang dilakukan harus dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang seharusnya dan semua harus dapat dipertanggung jawabkan di mata Tuhan, apapun agama pembelajar, tenaga didik maupun tenaga kependidikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**



- Allan C. Ornsten, Francis P.Hunkins 2004, *Curriculum Foundation, Principles and Issues*, Boston, USA
- Anam, S. 2006. *Sekolah Dasar Pergulatan Mengejar Ketertinggalan*. Solo: Wajatri.
- Arif, Rohman. (2009), *Politik Ideologi Pendidikan*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta
- Christopher Winch & John Gingel, 2004. *Philosophy & Educational Policy, a Critical Introduction*, London & New York, Routletgelfarmer
- Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Kelly, A.V. 2010. *The Curriculum, Theory and Practice*, 6<sup>th</sup> Edition, London LA, Washington, Singapore, New Delhi: The SAGE
- Loren Bagus, 2002, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- McCarthy, Christine. Richard Bailey, Robin Barrow, Davis Carr, 2010 *Handbook Of Philosophy of Education*, London LA, Washington, Singapore, New Delhi: The SAGE
- Pikiran Rakyat. 2006. *Kurikulum 2006 Pangkas 100-200 Jam Pelajaran*. [on line]<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/032006/08/0701.htm>
- Sanjaya, W. (2007) *Kajian Kurikulum dan Pembelajaran*. Bandung: Sekolah Pasca Sarjana UPI. Bandung
- Soenarta, N. (2005). *Biaya Pendidikan di Indonesia: Perbandingan pada Zaman Kolonial Belanda dan NKRI*. [on line] <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408/05/pddkn/1190238.htm>